****

**Kampus Tercinta – IISIP Jakarta**

Institute Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta

Hubungan Internasional di Asia Tenggara

“Hubungan ASEAN – Australia”

Disusun oleh:

Nurfaridha 2012230106

Deri Hermawan 2012230119

Riri Rosnida 2013230121

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK

INSTITUT ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK JAKARTA

JAKARTA

DESEMBER 2014

**DAFTAR ISI**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Rumusan Masalah

1.3. Manfaat dan Tujuan

BAB II PEMBAHASAN

2.1.Awal Hubungan ASEAN-Australia

2.2.Dinamika Hubungan ASEAN-Australia

2.3.Menjaga Hubungan Kerjasama ASEAN - Australia

2.4. Kebijakan Politik Australia

2.5. Kebijakan Ekonomi Australia

2.6. Kebijakan Keamanan Australia

BAB III PENUTUP

Kesimpulan

DAFTAR PUSTAKA

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Sejak didirikannya ASEAN pada tahun 1967, hubungan ASEAN dengan negara-negara mitra dialog makin meningkat demikian pula hubungannya dengan Australia, walaupun pada awalnya timbul beberapa masalah, seperti penerbangan sipil, ketidak-seimbangan perdagangan, dan keamanan regional sempat mengganggu hubungan antara mereka. Dalam pandangan ASEAN, keraguan Australia untuk menjadi bagian dari kawasan Asia Pasifik umumnya, dan Asia Tenggara khususnya telah menyebabkan timbulnya masalah-masalah tersebut.

Dengan berakhirnya Perang Dingin pengertian antara ASEAN dan Australia semakin kuat. Autralia merasa lebih yakin akan eksistensi dirinya sebagai bagian dari Asia dan menjadi lebih sensitif mengenai kepentingan ASEAN, terutama menyangkut keamanan regional. Australia aktif mendukung usaha-usaha ASEAN untuk memelihara stabilitas dan perdamaian kawasan Asia Tenggara. Perkembangan ini telah mendorong hubungan Australia dan ASEAN mengarah pada kemitraan. Pembahasan ini mengenai perkembangan ASEAN dan Australia sejak 1974 sampai kepada periode berakhirnya Perang Dingin.

**1.2 Rumusan Masalah**

Dalam isi makalahh ini, kelompok kami berfokus kepada

1. Bagaimana latar belakang terjalinnya kerjasama ASEAN – Australia ?

2. Dalam bidang apa saja hubungan kerjasama ASEAN – Australia?

**1.3 Tujuan dan Manfaat**

Tujuan dari pembuatan makalah ini selain untuk memenui tugas persentasi dalam mata kuliah Hubungan Internasional di Kawasan Asia Tenggara, kami berharap dapat membantu teman-teman untuk memahami materi yang kami sampaikan.

Manfaat dari makalah ini adalah ;

1. Membantu memahami dinamika hubungan ASEAN – Austtalia

2. Memberikan penjelasan tentang bagaimana dan kenapa ASEAN menjalin kerjasama dengan Australia

3. Menambah pemahaman atas hubungan ASEAN - Australia

**BAB II**

**PEMBAHASAN**

**2.1 Awal Hubungan ASEAN-Australia**

Pertengahan dekade 1970-an sampai 1980-an merupakan masa transisi bagi hubungan ASEAN dan Australia karena timbulnya berbagai persoalan diantara mereka. Pada awal pembentukannya tahun 1967, ASEAN menghadapi berbagai persoalan yang timbul di antara negara, antara lain masih terdapatnya sengketa teritorial. Seperti halnya Sengketa Sabah yang telah menimbulkan ketegangan antara Malaysia-Filipina dan hampir menimbulkan perpecahan dalam tubuh ASEAN. Sementara ASEAN mengatasi berbagai persoalan yang timbul di antara negara anggotanya dan mengadakan usaha-usaha konsolidasi ke dalam, perkembangan-perkembangan regional, dan internasional. Antara lain Perang Vietnam, diumumkannya Doktrin Nixon (1969), dicetuskannya gagasan Keamanan Kolektif Asia oleh Brezhnev (1969), pendekatan AS-China (1971), mundurnya pasukan Inggris dari Malaysia dan Singapura (1971), dan tumbuhnya kekuatan ekonoi Jepang. Kekhawatiran akan kekuatan lain mengisi “kekosongan” akibat penarikan pasukan Inggris dan AS, telah mendorong ASEAN untuk menerima gagasan ZOPFAN (Zona of Peace, Freedom and Neutrality) pada tahun 1971 yang dicetuskan oleh Malaysia. Dan Dektlarasi ZOPFAN tercermin prinsip-prinsip ASEAN yang antara lain menegaskan bahwa mereka itu telah berketetapan hati untuk menjamin stabilitas dan keamanannya dari campur tangan luar di dalam bentuk atau manifestasi apa pun.

Tidak mengherankan jika pada awal pembentukannya, ASEAN tidak memberi perhatian kepada hubungan dengan negara-negara luar. Baru menjelang pertengahan dasarwa 1970-an. ASEAN merasa percaya diri dalam membina hubungan dengan negara-negara luar dan diantara anggotanya karena saling pengertian dan rasa persatuan mulai terbina. Perkembangan Vietnam telah menunjukkan ke arah penyelesaiannya dengan dicapainya Persetujuan Perdamaian Paris 1973. Dari segi ekonomi negara-negara ASEAN mengalami pertumbuhan yang pesat (untuk periode 1970-1979 tingkat pertumbuhan ekonomi tahunan negara-negara ASEAN mencapai sekitar 6,1 persen sampai 9,2 persen). Timbulnya berbagai perkembangan di dunia internasional, misalnya krisis harga minyak OPEC (1973), kemenangan komunis di Indocina (1975), dan mundurnya kekuatan militer AS dari kawasan Asia Tenggara, mendorong ASEAN mulai memusatkan perhatiannya pada lingkungan luar. Negara-negara ASEAN menyadari pentingnya aksi bersama (*joint action*) sebagai suatu sarana untuk mencapai tujuan ekonomi dan politik bersama. Melalui perkembangan tersebut membawa ASEAN pada petengahan tahun 1970-an dalam membina hubungan dengan pihak luar atau yang disebut dengan mitra dialog (*dialogue partners*) yaitu Jepang, The European Community (Masyarakat Eropa), Australia, Selandia Baru, AS dan Kanada. Melalui bidang ekonomi ASEAN berharap mitra dialog dapat membantu ASEAN dalam investasi bantuan pembangunan, akses pasar yang lebih besar dari ekspor ASEAN, dan dukungan untuk dana stabilisasi hasil ekspor[[1]](#footnote-2).

**2.2 Dinamika Hubungan ASEAN - Australia**

Australia merupakan negara pertama yang ditetapkan ASEAN sebagai mitra dialognya pada tahun 1974. Sejarah hubungan Australia dengan negara-negara ASEAN sebelum organisasi tersebut dibentuk dan kedekatan geografis menyebabkan ASEAN menjadikan Australia sebagai mitra dialog pertama. Australia merupakan negara tetangga yang terdekat di bagian selatan dan telah mempunyai hubungan bilateral dengan negara-negara ASEAN sejak berakhirnya Perang Dingin. Demikian pula secara multilateral beberapa negara ASEAN bersama Australia telah menjadi anggota beberapa organisasi regional seperti Colombo Plan, SEATO (*Southeast Asia Treaty Organization*), ASPAC (*Asian and Pasific Council*), dan FPDA (*the five Five Power Defence Arrangements*). Pada periode ini masalah-masalah ekonomi di antara negara-negara Asia Tenggara dan Australia secara relatif tidak menonjol. Australia lebih khawatir akan ancaman keamanan regional, terutama dengan timbulnya perang Vietnam.

Kekhawatiran Australia tersebut menyebabkan negara ini dapat menerima kehadiran ASEAN sebagai suatu organisasi kerjasama regional yang didirikan oleh negara-negara kawasannya sendiri yang diharapkan dapat membangun keamanan dan stabilitas melalui kerjasama regional baik dalam bidang ekonomi maupun politik. Walaupun demikian, ASEAN nampaknya tidak terlalu menjadi perhatian oleh Australia. Hal ini disebabkan karena pada tahun 1950-an dan 1960-an Australia melihat kerjasama kawasan Asia Tenggara dengan Inggris dan AS untuk membendung komunis. Dalam hal ini, Australia cenderung melihat Asia Tenggara sebagai arena persaingan Perang Dingin. Sikap Australia ini lebih keberpihakannya ke Barat terutama Inggris dan AS supaya keamanan Australia pun terjamin.

Pada awal 1970-an pandangan Australia seperti mulai berubah, Australia mulai memperhatikan kawasan Asia Tenggara lebih serius dan berusaha untuk terlibat lebih jauh dalam kegiatan kerjasama regional. Tetapi Australia ragu-ragu apakah negaranya benar-benar ingin satu identitas dengan Asia Tenggara apabila iya apakah Australia mampu untuk mematuhi peraturan regional yang ada. Berdasarkan pandangan yang lebih jauh, apakah kepentingan dan masa depannya akan selalu terikat dengan Asia Tenggara atau dapatkah Australia mengharapkan menjadi pemain dalam panggung global yang lebih luas, pada era ini juga merupakan masa transisi bagi Australia yang terperangkap antara kepercayaan bahwa bagaimana pun negaranya tidak dapat terlepas dari Asia Tenggara di satu pihak, tetapi di pihak lain tekanan dalam negeri menyebabkan Australia menempuh kebijaksanaan yang dianggap tidak sensitif terhadap ASEAN. Akibatnya, para pembuat kebijaksanaan di Asia Tenggara melihat sikap Australia tidak pasti dan ragu-ragu tetapi ingin tetap mempertahankan kepentingannya untuk menjadi “bagian dari kawasan”. Sementara itu pejabat-pejabat Asia Tenggara lain menganggap Australia sebagai pihak asing yang tidak mengerti peralihan (*the subtleties*) kawasan. Pernyataan ini masih kerap digunakan pada tahun 1970-an dan awal 1980-an, terutama dalam menghadapi sikap Australia yang tidak sejalan dengan ASEAN dalam isu-isu regional[[2]](#footnote-3).

Menjelang tahun 1973 kemenangan Partai Buruh telah menempatkan ASEAN pada posisi yang lebih diandang dalam Pemerintahan Australia. ASEAN sebagai suatu kerjasama nonmiliter dan bertujuan untuk memajukan pembangunan ekonomi dan sosial sesuai degan keinginan secara umum Pemerintahan Partai Buruh yang tidak ingin menekankan aliansi ideologi dan militer dalam hubungannya dengan Asia Tenggara. Dalam kunjungannya ke negara-negara Asia Tenggara pada bulan Januari dan Februari 1974, P.M Whitlam menegaskan bahwa “... *ASEAN is unquestionably the most important, the most relevant, the most natural*”. Berbeda dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, pada pemerintaan P.M Whitlam ini, Australia telah memberi dukungannya atas gagasan ZOPFAN. Di pihak lain ASEAN menunjukkan keinginan mereka untuk mengadakan kerjasama ekonomi. Pada bulan April 1974, Menteri Luar Negeri Australia dan Sekretaris Jendral dari Sekretaris Nasional ASEAN menyetujui bahwa Australia akan menyumbangkan 5 juta dolar Australia bagi proyek ASEAN.

Sayangnya, perubahan kebijaksanaan Australia mengenai konflik Kambodja ternyata tidak sejalan dengan ASEAN dan telah menimbulkan reaksi ASEAN. Australia dianggap masih ragu-ragu untuk menjadi bagian dari Asia Tenggara dan karena itu tidak sensitif terhadap kepentingan mereka. Pada tahun 1975 ketika Perang Vietnam berakhir, Australia telah memainkan politik regional dalam usahanya untuk menjadi bagian dari Asia Tenggara. Sama halnya dengan ASEAN, Australia yang berada di bawah pemerintahan P.M Malcolm Fraser antara tahun 1976-1978 telah menerapkan kebijaksanaan hubungan baik dan melaksanakan program bantuan untuk Vietnam. Australia juga mendukung masuknya Vietnam menjadi anggota PBB pada tahun 1977 dan menegaskan perlunya mendorong Vietnam untuk memperluas kontak internasionalnya. Demikian pula ketika konflik Kambodja timbul pada tahun 1979-1980 Austraia mendukung posisi ASEAN yang menentang invasi Vietnam ke negara itu. Australia juga mejadi mitra ASEAN dalam mensponsori resolusi mengenai Kambodja, menyerukan penarikan mundur pasukan Vietnam dan penentuan nasib sendiri rakyat Kamboja yang kemudian diangkat sebagai resolusi PBB di Sidang Majelis Umum pada bulan November 1979 dan Oktober 1980. Kebijaksanaan Australia dalam konflik Kamboja ini merupakan dukungan positif bagi keserasian hubungannya dengan ASEAN.

Namun kemudian terjadi perubahan kebijaksanaan Australia karena tekanan publik dalam negeri. Terdapat antipati publik yang luas mengenai kebijaksanaan pengakuan atas Pemerintahan Domestik Rakyat Kabodja (PDRK). Publik dalam negri Australia menuntut agar pemerintaan Australia menjalankan kebijaksanaan yang tidak menentang Vietnam, tetapi mengusahakan timbulnya peredaan ketegangan antara Vietnam dan ASEAN. Kebijaksanaan ini bertentangan dengan ASEAN yang tetap mendukung PDRK dan menentang Vietnam. Demikian pula dengan tindakan Menteri Luar Negeri Bill Hayden yang pada tahun 1981 mengadakan kunjungan ke Malaysia, Vietnam dan bertemu dengan pemimpin Republik Rakyat Kambodja (*People’s Republic of Kampuchea*), Hun Sen, dan Singapura. Walaupun Menlu Hayden menyatakan pertemuannya dengan Hun Sen sebagai kunjungan pribadi dan bukan pengakuan terhadap rezim itu, inisiatif ini telah menimbulkan ketidaksenangan ASEAN, terutama Muangthai dan Indonesia. Australia dianggap telah melaksanakan kebijaksanaan yang bertentangan dengan ASEAN dan usaha Australia untuk melibatkan diri dalam masalah ini dianggap naif dan tidak sensitif. Di lain pihak Australia merasa berhak untuk memainkan peranannya di Asia Tenggata karena merasa bagian dari kawasan ini. Seperti dikemukakan oleh Hayden dalam pidatonya di depan Parlemen sekembalinya dari kunjungan tersebut “..*we are part of region... we want to know what is hapening and we want to make contribution in respect to our views and interest in relation to potential develompments..*”[[3]](#footnote-4)

Berbeda dengan konflik Kamboja, ASEAN dan Australia telah menunjukkan kerjasama yang baik dalam masalah pengungsi. Australia mendukung pendekatan kemanusiaan yang telah dilakukan ASEAN terhadap pengungsi, terutama dari Vietnam dengan menyediakan tempat penampungan pertama. Australia bersedia untuk mengatur pengiriman para pengungsi ke negara ketiga yang bersedia menerima. ASEAN juga telah mendapat dukungan dari Australia untuk mengadakan Konferensi Internasional mengenai Pengungsi.

Dalam bidang ekonomi dan perdagangan, hubungan ASEAN dengan Australia diwarnai oleh ketidakserasian. Diantara ASEAN dan Australia telah timbul sengketa penerbangan sipil yang disebabkan kebijaksanaan Australia yang dianggap merugikan salah satu anggota ASEAN. Meningkatnya persaingan dalam penerbangan sipil, kondisi keungan perusahaan penerbangan Quantas dan tuntutan biaya murah industri perjalanan telah mendorong Australia menetapkan kebijaksanaan untuk membatasi kapasitas penerbangan asing pada rute Australia-Eropa, dan menjamin *load factors* yang tinggi bagi seluruh penerbangan rute tersebut dengan tidak mendorong *stopovers* (melalui biaya surcharge yang tinggi) oleh para penumpang *en route*. Singapura yang paling dirugikan oleh kebijaksanaan tersebut telah berhasil mengajak ASEAN untuk menentang kebijakasanaan Australia. ASEAN menentang kebijaksanaan Australia tersebut dengan menempatkan persoalannya sebagai pertentangan Utara-Selatan. ASEAN dan Australia akhirnya berhasil mencapai kesepakatan antara lain pesawat-pesawat ASEAN dapat memperoleh akses terbatas dalam rute penerbangan murah Australia-Eropa dengan dasar sementara waktu yang kemudian dinilai kembali. Kasus sengketa penerbangan sipil ini menunjukkan bahwa solidaritas ASEAN telah berhasil memperjuangkan salah satu kepentingan anggotanya[[4]](#footnote-5).

Dalam perdagangan , hubungan ASEAN dan Australia telah terjadi ketidakseimbangan. Kondisi ekonomi ASEAN dan restruktur bagi kebijaksanaan ekonomi Australia (upah yang tinggi, peraturan baru mengenai upah pria dan wanita sama, dan penilaian kembali mata uang yang cukup tinggi) menyebabkan biaya industri manufaktur Australia tidak dapat bersaing dengan ASEAN yang lebih rendah. Untuk

melindungi produksi dalam negerinya, Australia telah melakukan proteksi atas ekspor ASEAN terutama barang-barang tekstil, bahan pakaian, dan alas kaki, yang menyebabkan timbulnya ketidakseimbangan perdagangan diantara mereka. Harapan ASEAN untuk mendapatkan akses pasar yang lebih besar tidak terpenuhi. Ketidakseimbangan perdagangan ASEAN-Australia terlihat dari data ekspor-impor tahun 1978-1979 dimana nilai ekspor Australia ke ASEAN meliputi 1.091 juta dolar Australia, sedangkan nilai impor Australia dari ASEAN hanya mencapai 641,9 juta dolar Australia.

Sebenarnya dalam bidang perdagangan Australia berusaha memberikan beberapa konsesi misalnya dalam Pertemuan Forum ASEAN-Australia ke-5 tahun 1980, Australia memenuhi permintaan ASEAN untuk pembaruan kembali 12,5 persen biaya tambahan impor (*import surcharge*) atas ekspor ASEAN ke Australia. Tetapi ASEAN tetap mengharapkan konsesi lebih jauh mengenai masalah perdagangan yang menyangkut Sistem Tarif Preferensi Australia (*the Australian System of Tariff Preferences/*ASTP) yang tidak dapat dipenuhi Australia. Kekecewaan ASEAN terlihat dari laporan Pertemuan Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN bulan Oktober 1980 di Bangkok yang menyatakan bahwa “*the ministers continued to be concerned at Australia’s protectionist policies and that Australian-sponsored consultations and research were not regarded as an acceptable substitute for action on trade liberalisation*”[[5]](#footnote-6). Ketidakpuasan ini berlanjut dan terlihat dari posisi ASEAN dalam Pertemuan Forum ASEAN-Autralia ke-8 tahun 1984 yang tetap mencatat bahwa ketidakseimbangan perdagangan telah menguntungkan Australia[[6]](#footnote-7).

Australia mengharapkan ASEAN dapat menerima kompensasi dari ketidakseimbangan perdagangan dengan mengadakan berbagai forum, proyek bersama, bantuan, investasi, dan arus turis ke ASEAN. Dalam Pertemuan Kepala-kepala Pemerintahan ASEAN dengan Perdana menteri Australia Malcolm Fraser tahun 1977 di Kuala Lumpur dicapai kesepakatan untuk membentuk Program Kerjasama Ekonomi ASEAN-Australia (*ASEAN-Australia Economic Co-operation Program/AAECP*). Melalui program ini pada tahun 1980-an Australia telah memberi bantuan sejumlah 34,5 juta dolar Australia untuk berbagai proyek (program industri dan perdagangan, proyek pendidikan, proyek kependudukan, pembentukan pusat karantina regional ASEAN). Bantuan Australia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, misalnya tahun 1982 jumlah total komitmen yang diberikan melalui AAECP meningkat dari 34,5 juta dolar Australia menjadi 56,7 juta dolar Australia dan ASEAN juga mengadakan berbagai forum antara lain Konferensi Kerjasama Industri yang diadakan di Meulborne tahun 1978, ASEAN *Trade Fair* telah diadakan tiga kali (1978 di Sydney, 1980 di Melbourne, 1983 di Perth), Konferensi Bisnis ASEAN-Australia diadakan di Kuala Lumpur (Juni 1980), Pertemuan Konsultatif ASEAN-Australia (*ASEAN-Australia Consultative Meetings*) diadakan pada tahun 1978 dan 1981[[7]](#footnote-8).

Sampai pada tahun 1984 hubungan ASEAN dan Australia diwarnai antara lain oleh masalah-masalah diatas. Sejauh ini masalah-masalah yang timbul diantara ASEAN dan Australia tidak mengarah pada memburuknya hubungan keduanya. Tetapi yang menjadi sumber dari timbulnya masalah-masalah diatas adalah persepsi, sikap, dan kebijaksanaan Australia terhadap Asia Tenggara yang mana oleh ASEAN dianggap tidak sensitif dalam usahanya untuk menjadi bagian dari kawasan ini baik dalam bidang politik maupun ekonomi. Dalam bidang politik dan keamanan, keinginan Australia untuk memainkan politik regional yang harus mempertimbangkan tekanan dalam negeri dan menjadi tidak sensitif terhadap kepentingan ASEAN akan menimbulkan ketidakserasian dalam hubungan yang ingin dibina. Demikian pula dalam bidang ekonomi, tidak dilakukannya usaha-usaha yang lebih serius yang dapat mengurangi ketidakseimbangan perdagangan kedua pihak akan mempengaruhi kelanjutan hubungan mereka. Oleh karena itu nampaknya Australia diharapkan lebih mengerti akan kepentingan ASEAN.

**2.3 Menjaga Hubungan Kerjasama ASEAN - Australia**

Setelah Perang Dingin berakhir, hubungan ASEAN dan Australia lebih diwarnai oleh saling pengertian yang lebih baik. ASEAN berusaha untuk lebih mengerti posisi Australia yang ingin menjadi bagian dari kawasan Asia Tenggara tanpa mengenyampingkan kepentingan globalnya. Demikian pula Australia berusaha menunjukkan kebijaksanaan yang tidak saja meningkatkan kerjasama tetapi juga ingin menjadikan ASEAN sebagai mitra dikawasan tersebut.

Berbagai perkembangan yang muncul setelah era Perang Dingin berakhir telah merubah pendekatan Australia terhadap Asia Pasifik pada umumnya, dan Asia Tenggara khususnya. Pengurangan pasukan AS di Asia Timur akibat tekanan dalam negeri dan masalah keuangan, telah menimbulkan kekhawatiran negara-negara di kawasan Asia akan keamanan kawasan, terutama mengingat kemungkinan-kemungkinan munculnya Cina sebagai ancaman, militerisasi Jepang, dan munculnya Korea Utara sebagai kekuatan nuklir. Perkembangan ini disusul dengan ditutupnya pangkalan militer AS di Filipina, telah mendorong negara-negara ASEAN untuk memikirkan usaha-usaha dalam mengadakan kerjasama multilateral bagi pemeliharaan stabilitas dan keamanan kawasan Asia Pasifik umumnya, dan Asia Tenggara khususnya. Sementara itu perkembangan tersebut mendorong Australia untuk memberikan perhatiannya kepada kawasan Asia, dan mengurangi ketergantungannya dengan AS. Menteri Pertahanan Australia Robert Ray menyatakan bahwa Australia telah membangun kesejahteraannya melalui hubungan ekonomi dengan Asia, dan sudah seharusnya memperkuat keamanannya melalui kerjasama strategis yang erat dengan Asia. Tetapi ini tidak berarti Australia akan memutuskan aliansi militernya dengan AS. Australia akan lebih memberi perhatian kepada pentingnya kebijaksanaan pertahanan yang lebih mandiri dan memperkuat kekuatan pertahanannya sendiri, kerjasama keamanan regional, dan meningkatkan hubungan dengan negara-negara tetangga[[8]](#footnote-9).

Selain itu perhatian Australia kepada kawasan Asia dapat dilihat dari usahanya untuk diakui sebagai bagian dari kawasan ini. Misalnya usaha Australia untuk berhubungan dengan Asia Timur diakui oleh Pemerintahan Jepang pada waktu kunjungan P.M Keating ke negara ini bulan Mei 1995. Pemerintahan Jepang menyambut baik keputusan Australia untuk memikirkan masa depannya di kawasan ini dan menegaskan kembali peranannya sebagai “*an indispensable partner*” dalam masalah regional. Dalam pertemuan tahunan ASEAN-*Post Ministerial Conference*/PMC di Brunei pada bulan Agustus 1995 keinginan Australia untuk ikut serta dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Asia-Eropa (*Asia Europe Summit Meeting*/ ASEM) disepakati. Australia akan diikutsertakan sebagai pihak Asia dalam ASEM ke-2 yang direncanakan diadakan pada tahun 1988. Partisipasi Australia dalam pertemuan ASEM sebagai pihak Asia ini menunjukkan kesadaran dan meningkatnya penerimaan kredibilitas Australia sebagai bagian atau anggota masyarakat ekonomi dan keamanan Asia[[9]](#footnote-10).

Dalam kebijaksanaan Australia yang lebih mandiri dan untuk memperkuat hubungan politik dan keamanan dengan Asia Tenggara, Australia menyadari bahwa jika ia tetap menunjukkan sikap tidak pasti sebagai bagian dari kawasan Asia Tenggara, maka hal ini akan makin menunjukkan kepada ASEAN bahwa Australia memang berbeda dan karena itu menjadi asing. Kesadaran ini akhirnya mendorong Australia merubah sikapnya terhadap Asia Teggara, khususnya ASEAN, dan tercermin dari pernyataan mengenai Keamanan Regional Australia (*Statement on Australia’s Regional Security*) yang dikemukakan oleh Senator Gareth Evans pada tahun 1989. Dalam pernyataan ini, Menlu menjabarkan pokok-pokok penting pelaksanaan kebijaksanaan luar negeri terhadap Asia Tenggara yang disebut “*comprehensive engagement*” yaitu:

* *Building a more diverse and substantive array of linkages with the countries of Southeast Asia, so that they have an important national interest in the maintanance of a ppositive relationship with Australia.*
* *Continuing to support the major existing regional association, ASEAN, and working with the countries of region to shape additional regional organizations or arrangements, such as APEC, which can contribute to the social and economic evelution of the region.*
* *Participating actively in the gradual development of regional security community based on a sense of shared security interest.*
* *Working for the involvement of Vietnam, Cambodja, Laos and Myanmar in the cooperative framework of region affairs.*
* *Recognizing that Australia, in a vigorously pursuing its national interest in the region, should do so as a confident and natural partner in a common neighbourhood of remarkable diversity, rathe than as a cultural misfit trapped by geography[[10]](#footnote-11).*

Dari pokok-pokok yang dicantumkan dalam “*comprehensive engagement*” tersebut dapat dilihat bahwa kebijaksanaan keamanan Australia di Asia Tenggara mengalami pergeseran dari global ke regional. Australia juga menegaskan dukungannya terhadap ASEAN termasuk melibatkan beberapa negara diantaranya Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Australia akan bekerjasama dengan negera-negara di kawasan Asia Tenggara mengembangkan organisasi kerjasama lainnya yang lebih luas seperti APEC (*Asia Pasific Economic Co-operation*). Lebih jauh Australia mengakui bahwa sudah seharusnya Australia melaksanakan kepentingannya di Asia Tenggara sebagai mitra yang dipercaya dan sewajarnya dalam suatu lingkungan yang sama dengan tetangga yang berbeda daripada terperangkap dalam mempersoalkan kebudayaan yang tidak sesuai yang diakibatkan oleh geografi. Dengan kata lain Australia seharusnya melaksanakan kepentingannya dengan percaya diri sebagai anggota yang absah di kawasan Asia Tenggara[[11]](#footnote-12). Dalam pelaksanaan pokok-pokok kebijakan kemanan ini, Australia berusaha untuk lebih sensitif terhadap kepentingan ASEAN. Hal ini tercermin dari kebijakan Australia dalam bidang politik, pertahanan dan keamanan, dan bidang perdagangan dan kerjasama ekonomi.

**Politik**

Dalam bidang politik, berbeda dengan sebelumnya, Australia pada tahun 1980-an berusaha untuk sejalan dengan upaya-upaya ASEAN dalam mencari penyelesaian konflik Kamboja. Sampai tahun 1986 kebijaksanaan Australia dibawah pemerintahan Hawke dalam masalah Kamboja masih menimbulkan ketidaksenangan ASEAN, misalnya kunjungan yang dilakukan Menlu Bill Hayden ke Vietnam dan Laos tahun 1985, dan kunjungan Menlu Vietnam, Nguyen Co Thach ke Australia tahun 1984 untuk mencari berbagai pilihan penyelesaian Kamboja. Pada tahun 1986 usul Menlu Bill Hayden untuk mengadakan suatu pengadilan penjahat perang internasional bagi Pol Pot dan para pengikut seniornya tidak ditanggapi oleh ASEAN. Baru tahun 1988 ketika Australia menyatakan kembali negaranya sebagai mitra sponsor resolusi ASEAN mengenai Kamboja, ASEAN dapat menerima bahwa Australia tidak akan merugikan posisi mereka dan keterlibatan Australia adalah absah, serta mempunyai penilaian secara independen. ASEAN dan Australia telah mencapai semacam konsensus mengenai prinsip-prinsip yang lebih luas mengenai penyelesaian konflik di Kamboja, antara lain mundurnya pasukan Vietnam dari Kamboja yang harus diikuti dengan pengaturan efektif untuk mencegah Pol Pot dan pasukan Khmer Merahnya berkuasa kembali di Kamboja, pemilihan umum yang bebas dan adil bagi rakyat Kamboja. Tetapi usaha-usaha ASEAN selanjutnya, misalnya dua pertemuan JIM (*Jakarta Informal Meeting*) pada bulan Juli 1988 dan Februari 1989, dan Konferensi Internasional Paris mengenai Kamboja (*the Paris International Conference on Cambodia/*PICC) pada bulan Juli-Agustus 1989 tidak berhasil mencapai penyelesaian Kamboja.

Menghadapi jalan buntu penyelesaian konflik Kamboja, pada bulan November 1989 Australia telah mengajukan usul perdamaian untuk melibatkan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) secara langsung dalam pemerintahan sipil Kamboja selama masa transisi. Usul untuk melibatkan PBB sebenarnya bukanlah hal yang baru karena pernah diajukan oleh Pangeran Sihanouk pada tahun 1981 walaupun dengan bentuk yang berbeda, yaitu gagasan pembentukan Wilayah Perwalian PBB. Usul Australia tersebut ternyata mendapat tanggapan internasional, termasuk dukungan AS yang kemudian mengusulkan Uni Soviet bergabung dengan tiga negara Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB untuk terlibat dalam konsultasi mengenai masalah Kamboja. Lima Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB (*Permanent Five Members of Security Councils*) telah mengambil usaha-usaha penyelesaian konflik Kamboja. Pada tanggal 26-28 Februari 1990 Indonesia mengadakan Pertemuan Informal mengenai Kamboja (*Informal Meeting on Cambodia/*IMC) di Jakarta yang melibatkan empat pihak Kamboja, Vietnam, Laos, dan ASEAN. Indonesia mengundang Australia dalam pertemuan ini sebagai panel ahli (*resource delegation*) karena dukungannya diakui membantu proses mencari penyelesaian konflik Kamboja. Walaupun tidak berhasil menyelesaikan konflik Kamboja, pertemuan tersebut merupakan proses pembangunan konsensus yang kemudian melicinkan jalan tercapainya Perjanjian Perdamaian Paris 1991[[12]](#footnote-13).

Lima tahun setelah penyelesaian konflik Kamboja, ASEAN berhasil mencapai Persetujuan Zona Bebas Senjata Nuklir (*Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone/*SEANWFZ) yang ditandatangani oleh sepuluh negara Asia Tenggara dalam KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) ASEAN ke-5 di Bangkok pada tanggal 18 Desember 1996. Australia menyambut baik penandatanganan itu dan mengharapkan ASEAN dan negara-negara nuklir akan dapat mencapai persetujuan mengenai isu-isu utama yang berkaitan dengan penandatanganan Protokol SEANWFZ dalam waktu dekat ini.

Peranan regional Australia makin mendapat pengukuhan oleh ASEAN. ASEAN menerima peran aktif Australia dalam proses pembentukan Forum Regional ASEAN (*ASEAN Regional Forum/*ARF). Hal ini terlihat dari apa yang dinyatakan ASEAN dalam Dialog ASEAN-Australia pada bulan Juli 1996 mengenai penghargaannya atas kontribusi Australia, terutama dalam usaha-usaha untuk membangung rasa saling percaya (*Confidence Building Measures/*CBM) *preventive diplomacy* dikawasan Asia Pasifik. Kontribusi Australia sejalan dengan pandangan ASEAN mengenai kaitan antara politik, keamanan, dan kesejahteraan ekonomi, sehingga diperlukan suatu pendekatan yang komprehensif untuk memelihara stabilitas dan perdamaian. ASEAN juga menyatakan kegembiraannya bahwa kedua pihak terus mempunyai pandangan yang sama mengenai berbagai perkembangan regional dan internasional.[[13]](#footnote-14) Australia juga turut mendukung konsensus yang diambil dalam Pertemuan Pejabat Tinggi (*Senior Official Meeting*/SOM) pada bulan Mei 1995 mengenai tujuan program dan organisasi kerja ARF. Selama beberapa tahun ini ARF telah menjadi prioritas tinggi bagi Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia.

**Keamanan**

Dalam bidang pertahanan dan keamanan, persepsi Australia terhadap Asia Tenggara makin jelas ditemukan dalam *Strategic Review* 1993 yang menyebutkan pentingnya Asia Tenggara karena ukurannya, kedekatan geografis (proximity), dinamika ekonomi, dan lokasi yang merupakan kawasan lintas Australia. Oleh karena itu Australia menginginkan hubungan keamanan dengan kawasan ini didasarkan kepada konsep kemitraan. Dari tujuan pertahanan Australia di Asia Tenggara dapat dilihat bagaimana Australia memandang kawasan ini, yaitu:

* *to enhance the capacity of our nearer region to exclude potentially hostile influences that could also threaten Australia’s security.*
* *To reduce the potential for misunderstanding and tension by promoting sound strategic assesment and force structuring processes through an increased security planning dialogue.*
* *To assist the development of effective self-defence capabilities, including through cooperation in defence science and technology.*
* *To move towards interoperability in key arean such as communications with the ASEAN relations.*
* *To establish Australia as a significant defence industrial base for the region through logistic cooperation, technology sharing and collaborative equipment projects.*
* *To mantain and develop FPDA as an example of successful regional co-operation*
* *To support stable maritime regime that permits free passage through important focal areas and choke points.*
* *To support a continued commitment by the United States to the region.[[14]](#footnote-15)*

Dari pokok-pokok yang dikemukakan di atas Australia dan ASEAN sepakat mengembangkan berbagai dialog dan kerjasama. Sebelumnya memang Australia telah mengembangkan berbagi kerjasama pertahanan bilateral dengan negara-negara ASEAN terutama Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Misalnya latihan pendidikan militer, pertukaran pejabat-pejabat militer.[[15]](#footnote-16) Untuk selanjutnya Australia akan memberikan prioritas yang lebih tinggi kepada pertukaran strategis (*strategic ex-change*), latihan kombinasi, persetujuan logistik, kerjasama industri dan pengetahuan, kerjasama latihan dan perolehan peralatan yang kooperatif. Meskipun Australia akan tetap melanjutkan penyediaan dana latihan dan kegiatan lainnya dibawah Program Kerjasama Pertahanan, diharapkan bahwa biaya peningkatan kegiatan ini akan ditanggung bersama. Diperkirakan menjelang tahun 2020 program Kerjasama Pertahanan yang secara tradisional dibiayai merupakan unsur utama dalam hubungan pertahanan dengan negara-negara Asia Tenggara tidak akan berlaku lagi. Kerjasama ini akan diganti dengan kegiatan-kegiatan yang lebih didasarkan atas hubungan kemitraan (*partnership-based relationship*).[[16]](#footnote-17) Hal ini berarti Australia akan memberikan kontribusi bagi keamanan regional terutama mengingat makin pentingnya ikatan ekonomi dan strategis antara Asia Tenggara dan Asia Pasifik.

Dewasa ini Australia dan negara-negara ASEAN secara individu (kecuali Vietnam) telah mempunyai hubungan pertahanan yang berkembang dan konstruktif, misalnya latihan bersama. Salah satu manifestasi dari hubungan pertahanan ASEAN-Australia yang dekat adalah keikutsertaannya beberapa negara ASEAN pada bulan Agustus 1995 dalam latihan militer Kangaroo 95 di daerah Australia Utara. Selain itu antara ASEAN dan Australia telah melakukan diskusi-diskusi dan perundingan-perundingan yang serius untuk merealisasikan pembangunan industri pertahanan yang utama. Perkembangan ini mempererat hubungan pertahanan dan membangun rasa saling percaya antara ASEAN-Australia yang memasuki tahapan baru. Masing-masing pemerintahan dan angkatan bersenjata ASEAN secara individual mengakui bahwa Australia telah menawarkan teknologi pertahanan canggih yang mampu bertahan (*sustainable*) di masa depan.[[17]](#footnote-18)

**Ekonomi**

ASEAN makin mempunyai arti penting dalam pandangan Australia ketika P.M. Paul Keating pada awal pemerintahannya telah mengadakan kunjungan ke negara-negara ASEAN pada akhir tahun 1995 dan awal tahun 1996. Pemerintahan Keating telah melaksanakan apa yang disebutnya strategi keamanan ekonomi (*economy security strategy*) sebagi kerangka baru bagi diplomasi Australia terhadap ASEAN. Strategi ini menawarkan suatu kesatuan program untuk mempertimbangkan kebijaksanaan ekonomi eksternal dan kebijaksanaan keamanan (*a unified program for considering external economic and security policies*).[[18]](#footnote-19) Realisasi strategi ini terlihat dari ditandatanganinya *the Agreement on Maintaining Security* antara Australia dan Indonesia pada bulan Desember 1995. Kemudian pada bulan Januari 1996 PM. Keating mengunjungi Malaysia dan berbicara dengan P.M Mahatir dengan memberikan prioritas untuk memperkuat pertukaran ekonomi. Pembicaraan ini merupakan langkah awal pencairan hubungan yang sempat terganggu karena kritik Keating terhadap sikap Mahatir sebagai “*recalcirant*” karena tidak menghadiri pertemuan APEC di Seattle tahun 1993. Pada saat itu timbul kekhawatiran hubungan kedua negara akan memburuk dan memberi pengaruh negatif atas perdagangan dan ikatan kebudayaan. Tetapi melalui diplomasi Keating itu, Australia telah memperbaiki hubungannya dengan Malaysia dan kerjasama ekonomi kedua negara tidak terganggu. Dalam kunjungannya ke Singapura, P.M. Paul Keating dan P.M. Goh Chok Tong mengumumkan komunikasi bersama mengenai *a new partnership*  yang akan memperkuat ikatan kedua negara dalam bidang politik, ekonomi, dan keamanan. Kedua negara menggarisbawahi bahwa pendekatan Australia mengenai keamanan ekonomi meliputi pelaksanaan ekonomi secara bersama-sama dengan ikatan keamanan.[[19]](#footnote-20) Dari pendekatan ketiga negara ASEAN ini terlihat bahwa Australia berusaha untuk meningkatkan tidak hanya kerjasama ekonomi, tetapi juga keamanan untuk memantapkan hubungan mereka yang pada gilirannya akan memberi dukungan kepada stabilitas dan perdamaian kawasan Asia Tenggara. Dengan perkataan lain makin kuatnya ikatan ekonomi dan keamanan akan memperkecil kemungkinan timbulnya gangguan dalam hubungan mereka yang dapat mengancam keamanan kawasan.

Oleh karena itu tidak mengherankan jika Australia berusaha mengembangkan kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan ASEAN. Australia telah mengembangkan kerjasama ekonomi dengan Wilayah Pertumbuhan ASEAN (*ASEAN Growth Area*), terutama bagian Timur (*the east ASEAN Growth Area/*EAGA) misalnya hubungan Australia dengan Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippine – *East ASEAN Growth Area* (BIMP-EAGA). Dalam rangka membina hubungan tersebut, mantan Mneteri Austria Utara (*Northern Territory*) untuk urusan Hubungan Asia dan Perdagangan berkunjung ke Filipina untuk menghadiri Konvensi Bisnis ASEAN Timur (*the East ASEAN Business Convention*) yang diadakan di Davao bulan November 1994. Direncanakan *Memorandum of Understanding*/MOU akan ditandatangai antara Australia Utara dan anggota BIMP-EAGA. EAGA ini terutama menawarkan kesempatan untuk mempromosikan hubungan ASEAN dan Australia bagi kerjasama yang praktis, terutama melalui hubungan komersial dengan wilayah masing-masing negara.[[20]](#footnote-21) Selain itu Australia turut berpatisipasi dalam Kerjasama Pengembangan Proyek Mekong ASEAN. Kerjasama ini dapat meningkatkan baik pembangunan ekonomi maupun stabilitas kawasan dan mempermudah integrasi Laos dan Kamboja ke dalam ASEAN.[[21]](#footnote-22)

ASEAN dan Australia juga menandatangai *Memorandum of Understanding/*MOU pada pertemuan ASEAN-PMC bulan Juli 1994 di Bangkok untuk menerapkan tahap ke-3 pelaksanaan Program Kerjasama Ekonomi ASEAN-Australia (AAECP). Dalam pertemuan ini dicapai persetujuan untuk menetapkan hubungan antara AFTA dan CER (*the Australian-New Zealand Closer Economic Co-operation*). Pada bulan Maret dan April 1995 para pejabat tinggi ASEAN, Australia, dan Selandia Baru mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan hubungan AFTA dan CER. Para Menteri Ekonomi ASEAN mengundang Menteri Perdagangan CER untuk berpatisipasi dalam konsultasi tingkat menteri pada bulan September 1995. Untuk menghadapi pertemuan ini telah dipertimbangkan 8 bidang kerjasama, termasuk standar harmonisasi dan prosedur beacukai (*custom*).[[22]](#footnote-23)

Dalam bidang perdagangan, keluhan ASEAN mengenai ketidakseimbangan yang terjadi diantara kedua pihak tampak lebih diperhatikan oleh Australia. Dalam Pertemuan ASEAN-Australia Forum ke-10 tahun 1986, Menlu Hayden mengumumkan revisi Sistem Preferensi Tarif Australia (*the Australian System of Tariff Preferencis/*ASTP) mengenai tekstil, pakaian, dan alas kaki. ASEAN menyatakan penghargaannya mengenai revisi ASTP yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1986 yang diharapkan akan memberi pengaruh yang positif atas perdagangan kedua pihak.[[23]](#footnote-24) Ekspor ASEAN ke Australia mengalami peningkatan. Duapuluh tahun yang lalu (1972-1973) nilai ekspor ASEAN yang mencapai 108 juta dolar Australia (2,6 persen dari total impor Australia) telah meningkat menjadi 4,8 milyar dolar Australia (8 persen dari impor Australia) pada tahun 1992-1993.[[24]](#footnote-25) Sementara itu impor Australia ke ASEAN tahun 1992-1993 mencapai nilai 8,7 milyar dolar Australia (14 persen dari jumlah total ekspor Australia). ASEAN telah menjadi pasar regional yang terbesar ke-2 bagi Australia setelah Asia Timur Laut (*Northeast Asia*), menggantikan Eropa dan Amerika Utara yang menduduki urutan ke-4.[[25]](#footnote-26)

Dari data yang diatas walaupun ekspor ASEAN ke Australia mengalami peningkatan, perdagangan kedua pihak masih menunjukkan ketidakseimbangan. Ekspor ASEAN ke Australia masih menghadapi masalah dengan hambatan nontarif dalam bentuk *anti dumping* dan *countervailing duty investigations*, serta pengawasan karantina. Oleh karena itu, ASEAN mendesak usaha-usaha yang kooperatif yang lebih besar dan dekat untuk mengatasi masalah-masalah ini, sehingga hubungan perdagangan kedua pihak dapat dipermudah dan liberalisasi perdagangan dapat dilakukan.[[26]](#footnote-27) Sampai pada tahun 1996, ASEAN masih sangat prihatin mengenai akses pasar ke Australia yang mengalami hambatan dalam pengembangan ekspor ASEAN.[[27]](#footnote-28) Walaupun demikian dalam bidang investasi, ASEAN mengakui adanya peluang yang terlihat dari nilai investasi ASEAN di Australia yang meningkat 27 persen dalam tahun 1993-1994 mencapai jumlah 9 juta dolar Australia. Demikian pula investasi Australia di ASEAN meningkat lebih dari 20 persen sampai Juni 1993 dan 10 persen sampai Juni 1994.[[28]](#footnote-29)

Hubungan *people to people* antara ASEAN dan Australia juga mengalami kemajuan. Hal ini dapat dilihat dengan makin meningkatanya arus turis, pelajar, mahasiswa, dan pendatang dari ASEAN ke Australia. Pada tahun 1995, arus turis meningkat mencapai 40 persen per tahun. Begitu pula jumlah pelajar atau mahasiswa ASEAN yang belajar di Australia, meningkat sampai 30 persen per tahun. Kaum pendatang yang menetap di Sydney mencapai 1/8 dari jumlah penduduk kota ini yang sebagian besar datang dari ASEAN. Kontak *people to people* ini mempunyai pengaruh positif dalam perkembangan hubungan ASEAN dan Australia karena akan menimbulkan apresiasi dan pengertian yang lebih baik mengenai masyarakat dan kebudayaan masing-masing negara.[[29]](#footnote-30)

**BAB III**

**PENUTUP**

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat usaha-usaha Australia untuk menjadi bagian dari kawasan Asia umumnya dan Asia Tenggara khususnya. Di masa-masa mendatang baik ASEAN maupun Australia perlu memelihara dan meningkatkan kerjasama diantara mereka dalam berbagai bidang untuk mencapai kemitraan yang langgeng. Berbagai tantangan akan di hadapi ASEAN dan Australia untuk mencapai tujuan ini. Untuk mencegah terjadinya kemungkinan konflik, sejauh ini negara-negara ASEAN telah terlibat dalam pertemuan informal untuk membentuk kerjasama di antara negara-negara yang bersengketa. Selain itu ASEAN dan Australia akan menghadapi berbagai tantangan dengan timbulnya ancaman nonkonvensional seperti masalah lingkungan, imigrasi, pengamanan sumber-sumber kekayaan laut, yang dapat mempengaruhi stabilitas dan perdamaian kawasan. Kedua pihak memerlukan kepekaan dan saling pengertian yang lebih baik untuk mencegah timbulnya gangguan dalam hubungan yang berkaitan dengan masalah-masalah tersebut. Misalnya, kebijaksanaan Australia dalam menangani imigran yang datang dari negara-negara ASEAN akan menimbulkan gangguan dalam mewujudkan kemitraan yang langgeng.

**DAFTAR PUSTAKA**

Usman, Asnani. “*ASEAN dan Australia: Membangun Kemitraan Untuk Masa Depan”* dalam Bandoro, Bantarto dan Gondomono, Ananta, Penyunting “*ASEAN dan Tantangan Satu Asia Tenggara*”

[**http://www.dfat.gov.au/asean/**](http://www.dfat.gov.au/asean/)

1. Allan Gyngell, “Looking Outward: ASEAN’s External Relations” dalam Alison Broinowski (ed.), *understanding ASEAN* (London and Basingstoke: The MacMillan Press, 1982), 115. [↑](#footnote-ref-2)
2. Andrew Maclntyre, “Comprehensive Engagement and Australia’s Security Interest in Southeast Asia” dalam Greg Fry (ed.), *Australian Regional Security* (Sydney: Allen & Unwin Australia, 1991), 113. [↑](#footnote-ref-3)
3. MacIntyre, ”Comprehensive Engagement,” 113. [↑](#footnote-ref-4)
4. Visit by the Minister for Foreign Affairs to Southeast Asia,” *Australia Foreign Affairs Record* 56, no.4 (April 1985): 296-297. [↑](#footnote-ref-5)
5. Forum ASEAN-Australia yang dibentuk pada tahun 1974 merupakan merupakan forum pertemuan pejabat tinggi kedua pihak yang bertanggung jawab kepada pemerintahan mereka untuk menilai seluruh aspek hubungan ASEAN-Australia. *Far Eastern Economic Review* (FEER), 31 Oktober – 6 November 1980. [↑](#footnote-ref-6)
6. *ASEAN Document Series* 1967-1988, 493. [↑](#footnote-ref-7)
7. Ibid. [↑](#footnote-ref-8)
8. Shi Yongming, “Australia is Seeking a New Orientation in the Asia-Pasific Regional,” *International Studies*, no. 6-8 (1997): 37-38. [↑](#footnote-ref-9)
9. Departemen of Foreign Affairs and Trade, *Departemen of Foreign Affairs and Trade Annual Report 1994-1995* (Canberra: the Australian Government Publishing Service, 1995), 63. [↑](#footnote-ref-10)
10. The Ministerial Statement by Senator Gareth Evans, *Australia’s Regional Security*, 6 Desember 1989, Pasal 176. [↑](#footnote-ref-11)
11. MacIntyre, “Comprehensive Engagement,” 112. [↑](#footnote-ref-12)
12. Ibid, 215. [↑](#footnote-ref-13)
13. *Twenty-Ninth ASEAN Ministerial Meeting, Post Ministerial Conferences with Dialogue Partners (PNC) & Third ASEA Regional Fo*rum (Jakarta: ASEAN Secretariat, 1996), 143. [↑](#footnote-ref-14)
14. Australian Government Publishing Service, *Strategic Review 1993* (Canberra: Australian Goverment Publishing Service, 1993), 23. [↑](#footnote-ref-15)
15. Ibid, 25 – 26. [↑](#footnote-ref-16)
16. Australian Government Publishing Service, “Defending Australia,” *Defence White Paper 1994* (Canberra: Australian Government Publishing Service, 1994), 86. [↑](#footnote-ref-17)
17. *Twenty-Eight ASEAN Ministerial Meeting, Post Ministerial Conferences with Dialogue Partners & Second ASEAN Regional Forum* (Jakrta: ASEAN Secretariat 1995), 117. [↑](#footnote-ref-18)
18. Research Institute for Peace and Security, *AsiAN Security 1996-97* (London: Brassey’s 1996), 211. [↑](#footnote-ref-19)
19. Ibid 212, 156, 171. [↑](#footnote-ref-20)
20. *Twenty-Eight ASEAN Ministerial Meeting*, 118. [↑](#footnote-ref-21)
21. *Twenty-Ninth ASEAN Ministerial Meeting*, 143. [↑](#footnote-ref-22)
22. *Twenty-Eight ASEAN Ministerial Meeting,* 143. [↑](#footnote-ref-23)
23. *ASEAN Documents Series 1967-1998I*, 495 [↑](#footnote-ref-24)
24. *Twenty-Ninth ASEAN Ministerial Meeting*, 104. [↑](#footnote-ref-25)
25. Ibid. [↑](#footnote-ref-26)
26. Ibid. [↑](#footnote-ref-27)
27. *Twenty-Seventh ASEAN Ministerial Meeting, ASEAN Regional Forum, and Post Ministerial Conference with Dialogue Partners* (Jakarta: ASEAN Secretariat, 1994), 102. [↑](#footnote-ref-28)
28. *Twenty-Eight ASEAN Ministerial Meeting*, 117. [↑](#footnote-ref-29)
29. Ibid, 118. [↑](#footnote-ref-30)